

## Public Hearing Dua Raperda, Salah Satunya Tentang Penyelenggaraan Pesantren



### GEMA DPRD KAB. GROBOGAN



**GROBOGAN (KR)** - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Grobogan, Jumat (30/9), menggelar rapat dengar pendapat umum (public hearing) dengan sejumlah elemen masyarakat dalam rangka menyusun Raperda inisiatif DPRD tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, dan Raperda Penanggulangan Penyakit Menular

Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Grobogan Hj Lusi Indah Artiani SE, dengan mengundang jajaran OPD terkait, beberapa organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan tim Kemenkumham sebagai pemapar untuk menjelaskan dasar hukum dan materinya. Tampak hadir Ketua dan para Wakil Ketua DPRD, pimpinan dan anggota Bapemperda. Menurut Lusi Indah Artiani, tujuan public hearing untuk menghimpun pemikiran masyarakat dalam bentuk masukan baik lisan

maupun tertulis guna kesempurnaan dua Raperda yang sedang disusun.

"Tujuannya agar dua Perda yang dihasilkan nanti sesuai dengan aspirasi dan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga nanti setelah ditetapkan menjadi Perda mendapat dukungan penuh dari masyarakat," harap politisi PDIP ini.

Lusi Indah menguraikan latar belakang penyusunan kedua draf Raperda tersebut. Disebutkan, pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan keagamaan mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Ilmu-ilmu agama dipahami sebagai pedoman hidup (tafaqh fi al-din) yang menekankan pentingnya moral dalam bermasyarakat. Dalam pola hidup pesantren yang terpenting bukan hanya pelajarannya, melainkan juga jiwanya. Pesantren sangat memperhatikan pembinaan kepribadian melalui penanaman akhlak dalam tingkah laku.

"Sebagai lembaga keagamaan dan pendidikan, pesantren juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi-inovasi yang dilakukannya. Sebagai local community organization yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, perlu adanya pemahaman bagi segenap warga bangsa bahwa kedudukan pesantren bukan hanya dalam fungsi pendidikan, namun juga dalam fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren," terang Lusi Indah.

Untuk itu dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat memerlukan dukungan regulasi di tingkat daerah. Melalui Perda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pe-



KR-M Taslim

### Rapat dengar pendapat umum Bapemperda DPRD Grobogan dalam rangka menyusun Raperda Penyelenggaraan Pesantren, dan Penanggulangan Penyakit Menular.

santren diharapkan penyelenggaraan pesantren dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Grobogan.

Sedangkan latar belakang penyusunan draf Raperda Tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Lusi menjelaskan, bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, dapat diketahui dari angka kes-

kitan, kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya penanggulangan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

"Sehubungan dengan hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah ini mempunyai alasan kuat untuk diwujudkan. Peraturan Daerah ini menetapkan dan mengatur penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Grobogan. Hal yang ditetapkan adalah penyakit yang harus dicegah dan ditanggulangi," jelas Lusi Indah. (Tas)-d



KR - Sri Warsiti

### Bimo menerjemahkan pesan informasi menggunakan bahasa isyarat.

### Ditingkatkan Website Ramah Disabilitas

**KLATEN (KR)** - Dinas Kominfo Kabupaten Klaten terus berupaya agar Portal informasi Pemerintah Kabupaten Klaten melalui website layanan informasi ppid.klaten.go.id lebih ramah disabilitas.

Kepala Dinas Kominfo Klaten, Amin Mustofa, didampingi Sub Koordinator Layanan Informasi dan Statistik, Joko Priyono, Senin (3/10) mengatakan, kini tata kelola website terkait penyebaran informasi bagi Pemkab Klaten terus dibenahi. Lewat sentuhan Filipus Bimo Dwi Hutomo atau akrab disapa Kak Bimo, penyebaran informasi publik pemerintah bisa lebih mudah diakses untuk kalangan tuna rungu dan tuna wicara.

Selain terus memperbaiki desain website agar semakin bagus, konten pesan khususnya terkait layanan informasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) bakal lebih ramah disabilitas. "Tata desain dan website yang ramah disabilitas jadi perhatian pemerintah. Kami berharap website Pemkab Klaten bisa lebih banyak diakses berbagai kalangan, termasuk teman-teman disabilitas. Semoga langkah ini lebih bermanfaat bagi warga," kata Amin Mustofa.

Terkait hal tersebut, Bimo mengatakan, ia diundang Dinas Kominfo (Komunikasi dan Informatika) untuk membantu menerjemahkan pesan-pesan informasi melalui website. Terutama mekanisme terkait permohonan informasi publik. "Ini tantangan bagi saya, apalagi harus didokumentasikan lewat video," kata Kak Bimo di sela-sela pengambilan gambar video di ruang Dinas Kominfo.

Pemuda yang tinggal di Jomboran, Klaten Tengah, Klaten, dan masih menyelesaikan studi di Universitas Widya Dharma Klaten itu mengatakan belajar outodidak untuk menjadi penerjemah bahasa isyarat. Dia mengaku belajar bahasa isyarat tersebut dari teman-teman komunitas disabilitas.

"Saya sebetulnya mahasiswa seni. Menerjemahkan bahasa secara langsung itu berbeda dibandingkan jika sudah ada skrip atau narasinya. Kendala utama untuk teman tunarungu dan tunawicara adalah koleksi kosakata mereka yang terbatas. Kalau ada narasi awal, kami bisa memilih pesan yang lebih tepat," tutur Kak Bimo. (Sit)-d



KR-Istimewa

### Para peserta 'Ngopi Darat' Prodi Pemberdayaan Masyarakat UNS Surakarta.

### 'Ngopi Darat' Bahas Pemberdayaan Masyarakat

**SOLO (KR)** - Alumni dan mahasiswa S2 dan S3 Prodi Pemberdayaan Masyarakat UNS Surakarta melakukan 'Ngobrol Bareng Pemberdayaan Masyarakat' (Ngopi Darat) di Tawangmangu Solo. Kegiatan berlangsung selama dua hari, Jumat (30/9) dan Sabtu (1/10), membahas perkembangan prodi Pemberdayaan

Masyarakat. Ketua Prodi Dr Sapja Anantanyu MSi mengungkapkan perkembangan prodi yang sangat luar biasa. Ditandai dengan adanya sejumlah institusi perguruan tinggi di Indonesia yang membuka dan mengembangkan prodi serupa. Dr Sapja mengakui, pelaksanaan proses pembelajaran prodi pada masa

pandemi Covid-19 sempat mengalami beberapa kendala. Di antaranya mahasiswa tidak mengenal satu sama lain dikarenakan interaksi pembelajaran dilakukan secara daring. Ia menegaskan, nomenklatur jurusan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, namun esensinya tetap sama. (No)-d

## Tidak Hanya Tempat Wisata

# BUMDes DISARANKAN JUGA MENGELOLA KOMODITAS PANGAN

**SOLO (KR)** - Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah Sumanto mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak hanya mengelola obyek pariwisata saja. BUMDes juga disarankan untuk mengelola komoditas pangan. Pasalnya komoditas pangan memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan menjadi konsumsi semua orang. Langkah tersebut juga akan mendorong peningkatan perekonomian di desa.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah Sumanto kepada wartawan di Solo Senin (3/10). Menurut Sumanto, dari sekian banyak BUMDes yang ada di Jawa Tengah, yang berhasil dan maju adalah BUMDes yang mengelola potensi wisata.

Dia mencontohkan destinasi wisata Umbul Pongok di Kabupaten Klaten yang dikelola BUMDes setempat dan sukses mendatangkan banyak wisatawan. Meski demikian banyak juga BUMDes yang pengelolannya kurang optimal dan hanya sekedar memiliki papan nama.

"BUMDes ini muncul sudah sejak lama. Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda) mengatur usaha di tingkat desa ini. Di Jawa Tengah BUMDes yang bisa maju yang memiliki potensi wisata. BUMDes yang bisa mengelola obyek wisata di wilayahnya bisa hidup. Sedangkan BUMDes yang lain belum," ujarnya Sumanto.

Terkait dengan hal tersebut, Sumanto juga mendorong agar BUMDes juga melakukan pengelolaan lumpung pangan di desa-desa. Apalagi Jawa Tengah merupakan Provinsi penghasil beras utama di Indonesia dan menjadi penyangga pangan nasional.



Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah Sumanto

"Ini momentum untuk menjadikan BUMDes kembali ke seperti dulu. BUMDes dulu namanya lumpung pangan. Karena pangan ini merupakan komoditas yang semua orang mengonsumsi. Sementara Jawa Tengah ini penghasil produk pertanian kalau tidak nomor satu ya nomor dua se Indonesia," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar ini mengakui kalau Jawa Tengah ini merupakan provinsi pengha-

sil produk pertanian yang tinggi. Meski demikian, prestasi tersebut belum sebanding dengan tingkat kesejahteraan yang diterima para petani.

Dari data yang ada, di Jawa Tengah ada sekitar 3,5 juta penduduk yang berprofesi sebagai petani. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 1,5 juta petani yang memiliki lahan dengan luas dibawah 2.000 meter persegi.

Dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah yang hanya Rp 4.200 per kilo-

gram, penghasilan mereka hanya sekitar Rp 400 ribu per bulan. Jumlah tersebut jauh dari Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK di Jawa Tengah yang mencapai Rp 2 juta hingga Rp 2,8 juta per bulan.

Sumanto mengatakan, penghasilan petani yang sangat rendah tersebut membuat angka kemiskinan di Jawa Tengah sulit diturunkan. Sumanto memerinci dari 19 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masuk kategori daerah miskin ekstrem, sebagian be-

sar merupakan wilayah penghasil pangan seperti Kabupaten Klaten, Karanganyar, Sragen, Purworejo, dan Grobogan.

"Dengan kondisi yang cukup memprihatinkan tersebut, saya mendorong agar BUMDes ini kerjasama dengan Bulog dan BUMN untuk menyediakan pangan lokal. Saat ini ada 19 kabupaten/kota di Jateng masuk kategori miskin ekstrem, dari sebelumnya 5 kabupaten/kota sebelum pandemi. Itu 19 kabupaten/kota

penghasil pangan semua," tegas Sumanto.

Dikatakan Sumanto, tidak semua BUMDes harus mengelola tempat wisata. Bidang pengelolaan BUMDes seharusnya disesuaikan dengan potensi yang ada di desa. Dia meminta BUMDes melakukan perencanaan dan terobosan karena mengelola usaha tidaklah mudah.

"Dengan adanya BUMDes ini ke depan harus ada program dari kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat, karena merintis usaha itu sulit. Apalagi merintis usaha di tingkat desa. BUMDes ini dikelola oleh masyarakat pedesaan, sehingga diperlukan adanya perencanaan yang matang," tandasnya.

Menurut Sumanto, BUMDes bisa menjadi holding atau acuan bagi para pengusaha kecil yang ada di desa. Dengan begitu, anak muda yang memiliki rpotensi bisnis bisa masuk ke BUMDes. Dengan begitu, BUMDes akan menjadi bagian optimalisasi kemajuan desa.

Menurut Sumanto, bidang usaha yang bisa digarap oleh BUMDes sebenarnya cukup luas. Sektor pengadaan barang dan jasa di pemerintah bisa diakses oleh BUMDes. Kalau BUMDes bisa menggarap sektor ini, BUMDes memiliki peluang besar yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Data menunjukkan, dari 7.809 desa yang ada di Jawa Tengah, ada sekitar 7.173 BUMDes. Pembentukan BUMDes sendiri diharapkan berasal dari usulan masyarakat desa. Setelah berdiri, pengelola BUMDes perlu menyusun program kerja sesuai potensi yang ada di desa. (adv)